

2023



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
JANUARI 2024

*Jalan Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34812
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041
E-mail: dinas.pupr.lambar@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 003 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Penyusunan LPPD ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Semoga LPPD ini telah menggambarkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2023.

Liwa, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



Ir.A N S A R I
Pembina Utama Muda
NIP.19640912 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tupoksi SKPD.....	2
C. Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana.....	2
BAB II URUSAN KONKRUEN.....	4
1. Ringkasan Urusan (Pelaksana Urusan Wajib/Urusan Pilihan/Fungsi Penunjang Pemerintah Daerah.....	4
2. Program dan Kegiatan	4
3. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	8
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim	19
5. Permasalahan dan Solusi.....	20
BAB III TUGAS PEMBANTUAN.....	21
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	21
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21
4. Program, Kegiatan, Keluaran dan Rincian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21
5. Target Program dan Kegiatan.....	21
6. Alokasi Anggaran Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Realisasi Capaian Kegiatan.....	21
7. Permasalahan dan Kendala.....	21
8. Saran dan Tindak Lanjut.....	21
BAB IV KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS).....	22
1. Mitra yang Diajak Kerjasama.....	22
2. Dasar Hukum dan Bidang Kerja Sama.....	22
3. Nama Kegiatan.....	22
4. Jangka Waktu Kerja Sama.....	22
5. Lampiran Fotocopy Dokumen Kerja Sama.....	22
BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
1. Jenis Pelayanan Dasar SPM.....	23

2. Realisasi SPM.....	23
3. Alokasi Anggaran SPM.....	24
4. Dukungan Personil.....	25
PENUTUP.....	26

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Data Pendukung LPPD Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari jabatan eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang memiliki kewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintah serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik.

B. Tupoksi SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

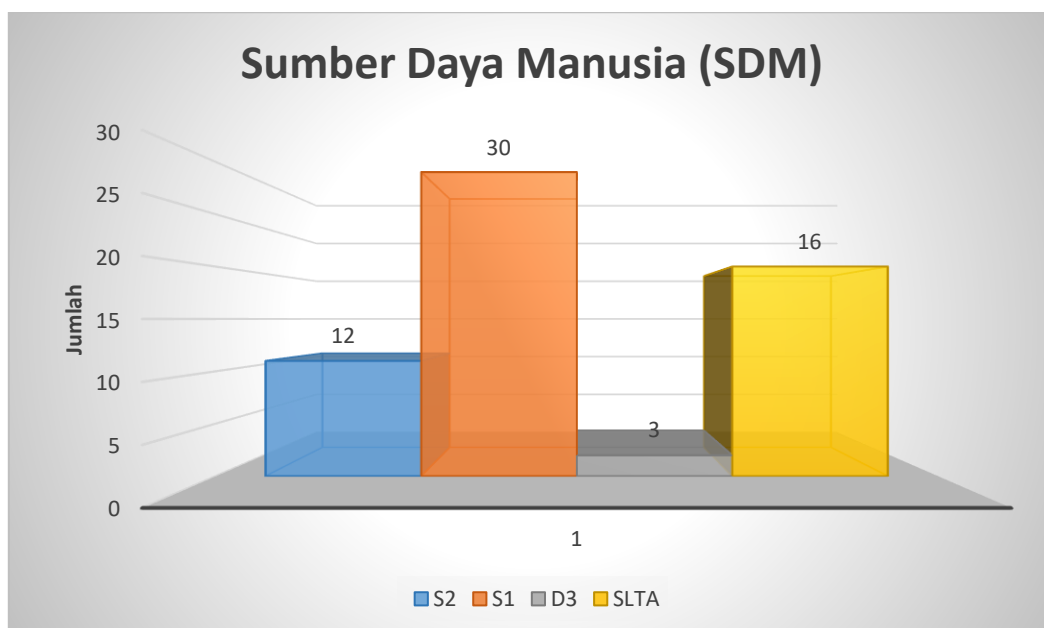
- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	12
2	S1	30
3	D3	3
4	SLTA sederajat	16

Grafik Sumber Daya Manusia



Sarana dan Prasarana

Prasarana terdiri dari :

- a. Bangunan kantor : 1 unit
- b. Bangunan workshop : 1 unit

Sarana terdiri dari :

- a. Kendaraan roda 4 : 7 unit
- b. Kendaraan roda 2 : 3 unit
- c. Alat berat
 - Excavator : 2 unit
 - Loader : 1 unit
- d. Komputer : 12 unit

BAB II

URUSAN KONKRUEAN

1. Ringkasan Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan sebanyak 16 (enam belas) program dan 23 (dua puluh tiga) dan kegiatan 57 (lima puluh tujuh) subkegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Lampung Barat. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- 1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - 2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
 - 2.1.2 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.3 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - 2.1.4 Rehabilitasi Check Dam
 - 2.1.5 Normalisasi/Restorasi Sungai
 - 2.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 2.2.2 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
- 2.2.3 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 2.2.4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 2.2.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - 3.1.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - 5.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
6. Program Program Pengembangan Permukiman
 - 6.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.2 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penataan Bangunan Gedung
 - 7.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 7.1.1 Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - 8.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 8.1.1 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
9. Program Penyelenggaraan Jalan

- 9.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 9.1.2 Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 9.1.3 Survei Kondisi Jalan/Jembatan
 - 9.1.4 Pembangunan Jalan
 - 9.1.5 Rekonstruksi Jalan
 - 9.1.6 Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 9.1.7 Pembangunan Jembatan
 - 9.1.8 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

- 10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - 10.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 10.1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

- 11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 11.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 11.1.1 . Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

- 12. Program Pengembangan Perumahan
 - 12.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 12.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

- 13. Program Kawasan Permukiman
 - 13.1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 13.1.2. Perbaikan Rumah Tidak Layak

- 14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 14.1 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 14.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 15. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
 - 15.1 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 15.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 16. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - 16.1 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - 16.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

16.2 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

16.2.1 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 dengan alokasi dan realisasi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp30.110.000,00, dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp30.039.600,00 atau 99,77%.

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, jumlah anggaran Rp5.428.000,00, dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp5.425.000,00 atau 99,94%.

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah anggaran Rp6.152.500,00 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.122.800,00 atau 99,52%.

1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, jumlah anggaran Rp6.155.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp6.140.000,00 atau 99,76%.

1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, jumlah anggaran Rp7.080.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp7.069.800,00 atau 99,86%.

1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah anggaran Rp7.180.000,00, dengan capaian sub kegiatan 18 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp7.180.000,00 atau 100,00%.

1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah anggaran Rp23.770.000,00 dengan capaian sub kegiatan 18

dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp20.517.500,00 atau 86,32%.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah anggaran Rp4.890.642.160,00 dengan capaian sub kegiatan 12 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp4.824.481.080,00 atau 98,65%.

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, jumlah anggaran Rp7.870.000,00, dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp7.863.000,00 atau 99,91%.

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, jumlah anggaran Rp8.575.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp8.545.000,00 atau 99,65%.

1.2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, jumlah anggaran Rp10.175.000,00, dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp10.110.000,00 atau 99,36%.

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, jumlah anggaran Rp10.000.000,00, dengan capaian sub kegiatan 2 orang. Realisasi kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 atau 100%.

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran Rp5.988.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 jenis. Realisasi kegiatan sebesar Rp5.920.000,00 atau 98,86%.

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah anggaran Rp13.700.000,00 dengan capaian sub kegiatan 8 jenis. Realisasi kegiatan sebesar Rp13.699.600,00 atau 100%.

- 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah anggaran Rp9.360.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 SKHU. Realisasi kegiatan sebesar Rp9.300.000,00 atau 99,36%.
- 1.4.4 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, jumlah anggaran Rp7.265.000,00 dengan capaian sub kegiatan 12 kali. Realisasi kegiatan sebesar Rp7.200.000,00 atau 99,11%.
- 1.4.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah anggaran Rp70.444.000,00 dengan capaian sub kegiatan 12 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp70.301.300,00 atau 99,80%.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp40.902.000,00 dengan capaian sub kegiatan 18 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp40.600.000,00 atau 99,26%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran Rp7.325.000,00 dengan capaian sub kegiatan 240 surat. Realisasi kegiatan sebesar Rp7.325.000,00 atau 100,00%.
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah anggaran Rp42.800.000,00 dengan capaian sub kegiatan 72 rekening. Realisasi kegiatan sebesar Rp31.962.713,00 atau 74,68%.
 - 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah anggaran Rp206.839.750,00 dengan capaian sub kegiatan 12 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp202.316.100,00 atau 97,81%.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan, jumlah anggaran Rp219.937.000,00 dengan capaian sub kegiatan 11 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp166.787.986,00 atau 75,83%.

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, jumlah anggaran Rp142.716.500,00 dengan capaian sub kegiatan 2 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp133.234.000,00 atau 93,36%.

1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp29.800.000,00 dengan capaian sub kegiatan 12 unit. Realisasi kegiatan sebesar Rp29.800.000,00 atau 100%.

1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp46.569.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 gedung. Realisasi kegiatan sebesar Rp46.565.000,00 atau 99,99%.

1.7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp728.828.900,00 dengan capaian sub kegiatan 3 gedung. Realisasi kegiatan sebesar Rp701.381.861,00 atau 96,23%.

2. Program Penyelenggaraan Jalan

2.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, jumlah anggaran Rp1.647.509.088,00 dengan capaian sub kegiatan 25 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.641.701.000,00 atau 99,65%.

2.1.2 Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan, jumlah anggaran Rp593.919.280,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp590.588.800,00 atau 99,44%.

2.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, jumlah anggaran Rp1.560.315.672,00, dengan capaian sub kegiatan 0,68 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.555.063.000,00 atau 99,66%.

2.1.4 Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, jumlah anggaran Rp65.578.071.545,00 dengan capaian sub kegiatan 25,78 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp64.932.966.250,00 atau 99,02%.

- 2.1.5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, jumlah anggaran Rp12.721.983.000,00, dengan capaian sub kegiatan 3,93 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp12.354.503.000,00 atau 97,11%.
- 2.1.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, jumlah anggaran Rp2.202.750.327,00 dengan capaian sub kegiatan 123,5 KM. Realisasi kegiatan sebesar Rp2.199.348.000,00 atau 99,85%.
- 2.1.7 Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, jumlah anggaran Rp234.734.304,00 dengan capaian sub kegiatan 12 bulan. Realisasi kegiatan sebesar Rp224.708.000,00 atau 95,73%.
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 3.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi, jumlah anggaran Rp87.348.000,00 dengan capaian sub kegiatan 35 orang. Realisasi kegiatan sebesar Rp46.883.000,00 atau 53,67%.
4. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 4.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, jumlah anggaran Rp285.061.700,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp279.312.700,00 atau 97,98% .
- 4.1.2 Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp108.463.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp107.739.000,00 atau 99,33%.
- 4.1.3 Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya, jumlah anggaran Rp188.100.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp187.258.000,00 atau 99,55%.

- 4.1.4 Sub Kegiatan Rehabilitasi Check Dam, jumlah anggaran Rp398.772.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp393.119.000,00 atau 98,58%.
- 4.1.5 Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai, jumlah anggaran Rp1.164.163.000,00 dengan capaian sub kegiatan 4 lokasi. Realisasi kegiatan sebesar Rp1.154.042.000,00 atau 99,13%.
- 4.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, jumlah anggaran Rp169.373.400,00 dengan capaian sub kegiatan 4 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp166.676.400,00 atau 98,41%.
- 4.2.2 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp746.152.000,00 dengan capaian sub kegiatan 30 Ha. Realisasi anggaran sebesar Rp643.830.000,00 atau 86,29%.
- 4.2.3 Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa, jumlah anggaran Rp200.816.000,00 dengan capaian sub kegiatan 8 Ha. Realisasi kegiatan sebesar Rp200.261.000,00 atau 99,72%.
- 4.2.4 Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp526.955.000,00 dengan capaian sub kegiatan 21 Ha. Realisasi anggaran sebesar Rp521.288.000,00 atau 98,92%.
- 4.2.5 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp346.450.000,00 dengan capaian sub kegiatan 2 Lokasi. Realisasi anggaran sebesar Rp344.031.000,00 atau 99,30%.
- 4.2.6 Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, jumlah anggaran Rp926.237.900,00 dengan capaian sub kegiatan 586 Ha. Realisasi anggaran sebesar Rp912.010.900,00 atau 98,46%.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM , jumlah anggaran Rp697.467.000,00 dengan capaian sub kegiatan 2 Dokumen. Realisasi anggaran sebesar Rp687.373.000,00 atau 98,55%.
 - 5.1.2 Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, jumlah anggaran Rp799.680.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 Lokasi. Realisasi anggaran sebesar Rp796.390.000,00 atau 99,59%.

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - 6.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, jumlah anggaran Rp2.832.000.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 Lokasi. Realisasi anggaran sebesar Rp2.832.000.000,00 atau 100 %.
 - 6.1.2 Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman, jumlah anggaran Rp2.250.200.000,00 dengan capaian sub kegiatan 5 Lokasi. Realisasi anggaran sebesar Rp2.250.200.000,00 atau 100 %.

7. Program Pengembangan Permukiman
 - 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 7.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp10.973.837.082,00 dengan capaian sub kegiatan 6,133 KM. Realisasi anggaran sebesar Rp. Rp10.949.623.150,00 atau 99,78%.
 - 7.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp470.219.680,00 dengan capaian sub kegiatan 1 Dokumen. Realisasi anggaran sebesar Rp464.577.100,00 atau 98,80%.

8. Program Penataan Bangunan Gedung

8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

8.1.1 Sub Kegiatan Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp10.511.491.576,00 dengan capaian sub kegiatan 9 Unit. Realisasi anggaran sebesar Rp10.092.451.500,00 atau 96,01%.

9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

9.1.1 Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan, jumlah anggaran Rp2.100.000.000,00 dengan capaian sub kegiatan 2 Unit. Realisasi anggaran sebesar Rp2.089.422.000,00 atau 99,50%.

10. Program Pengembangan Perumahan

10.1 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

10.1.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, jumlah anggaran Rp80.794.500,00 dengan capaian sub kegiatan 2 Unit. Realisasi anggaran sebesar Rp44.622.000,00 atau 55,23%.

11. Program Pengembangan Perumahan

11.1 Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

11.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, jumlah anggaran Rp148.948.500,00 dengan capaian sub kegiatan 15 Kecamatan. Realisasi anggaran sebesar Rp105.504.500,00 atau 70,83%.

12. Program Kawasan Permukiman

- 12.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
 - 12.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, jumlah anggaran Rp307.500.000,00 dengan capaian sub kegiatan 1 Dokumen. Realisasi anggaran sebesar Rp282.506.000,00 atau 91,87%.
13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 13.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 13.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi. Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp403.996.600,00, dengan capaian sub kegiatan 0 dokumen. Realisasi kegiatan sebesar Rp226.177.400,00 atau 55,98%.
14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 14.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 14.1.1 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp107.167.000,00, dengan capaian sub kegiatan 2 kasus. Realisasi kegiatan sebesar Rp107.077.000,00 atau 99,92%.
15. Program Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - 15.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
 - 15.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran Rp556.023.000,00 dengan capaian sub kegiatan 256 Percil. Realisasi anggaran sebesar Rp530.243.480,00 atau 95,36%.
 - 15.2 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - 15.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, jumlah anggaran Rp201.095.000,00 dengan capaian sub

kegiatan 1000 Orang. Realisasi anggaran sebesar Rp199.917.000,00 atau 99,41%.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, Pejabat yang telah mengikuti Diklatpim

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	13
2	S1	38
3	D3	5
4	SLTA sederajat	14
	JUMLAH	70

Jumlah pegawai berdasarkan golongan :

GOL.	a	b	c	d	JUMLAH
IV	4	2	1	-	7
III	17	3	10	11	48
II	-	-	8	7	15
I	-	-	-	-	
	JUMLAH				70

Jumlah pejabat struktural

STRUKTURAL	JUMLAH
ESSELON II B (KEPALA DINAS)	1
ESSELON III A (SEKRETARIS DINAS)	1
ESSELON III B (KEPALA BIDANG)	5
ESSELON IV A (KEPALA SEKSI & KASUBBAG)	2
ESSELON IV B KASUBBAG TU UPTD	1
JUMLAH	10

Jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklatpim

STRUKTURAL	JUMLAH
ESSELON II B (KEPALA DINAS)	1
ESSELON III A (SEKRETARIS DINAS)	1
ESSELON III B (KEPALA BIDANG)	2
ESSELON IV A (KEPALA SEKSI & KASUBBAG)	
ESSELON IV B KASUBBAG TU UPTD	1
JUMLAH	5

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum memadai jumlah sumber daya manusia terhadap beban kerja dinas.
- b. Jumlah alat berat dari sisi kualitas dan kuantitas masih kurang.

Penyelesaian masalah :

- a. Menambah jumlah sumber daya manusia.
- b. Menambah jumlah dan jenis alat berat

BAB III
TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tidak ada

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

4. Program, Kegiatan, Keluaran dan Rincian Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tidak ada

5. Target Program dan Kegiatan

Tidak ada

6. Alokasi Anggaran Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Realisasi Capaian Kegiatan

Tidak ada

7. Permasalahan dan Kendala

Tidak ada

8. Saran dan Tindak Lanjut

Tidak ada

BAB IV

KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

Tidak ada

2. Dasar Hukum dan Bidang Kerja Sama

Tidak ada

3. Nama Kegiatan

Tidak ada

4. Jangka Waktu Kerja Sama

Tidak ada

5. Lampiran Fotocopy Dokumen Kerja Sama

Tidak ada

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik
- c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Realisasi SPM

Capaian realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai tahun 2022 adalah:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

Target Tahun 2022 = 3.276 rumah tangga

Realisasi = 127 rumah tangga

$SPM \text{ Tahun } 2022 = \frac{127}{3276} \times 100\% = 3,9\%$

- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Target 2022 = 1.059 rumah tangga

Realisasi 2022 = 975 rumah tangga

$SPM \text{ Pelayanan Air Limbah domestik} = \frac{975}{1059} \times 100\% = 92.07\%$

- c. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten.

Target 2022 = 4 unit.

Realisasi 2022 = 2 Unit

$SPM \text{ RLH bagi korban bencana} = \frac{2}{4} \times 100\% = 50\%$

- d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten. Pada tahun 2022 tidak ada pemenuhan SPM tersebut.

3. Alokasi Anggaran SPM

1. Alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebagai berikut:

Kegiatan Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota jumlah anggaran **Rp. 1.497.147.000,-**. Realisasi kegiatan sebesar **Rp. 1.483.763.000,-** atau **99,11 %**.

2. Alokasi anggaran penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota **Rp. 5.082.200.000,-** dengan capaian kegiatan tersedianya prasarana dan sarana sanitasi bagi masyarakat yang lokasinya tersebar di Kabupaten Lampung Barat. Realisasi kegiatan sebesar **Rp. 5.082.200.000,-** atau **100 %**.

3. Alokasi anggaran Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana kabupaten sebagai berikut:

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota **Rp. 80.794.500,-** dengan realisasi **Rp. 44.622.000,-** atau **0.55%**.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjumlah 23 orang.

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian sasaran kinerja yang ditetapkan telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah ditentukan melalui keterlibatan, dukungan aktif dan komitmen segenap komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pembangunan infrastruktur.

Liwa, Januari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat



Ir. ANSARI

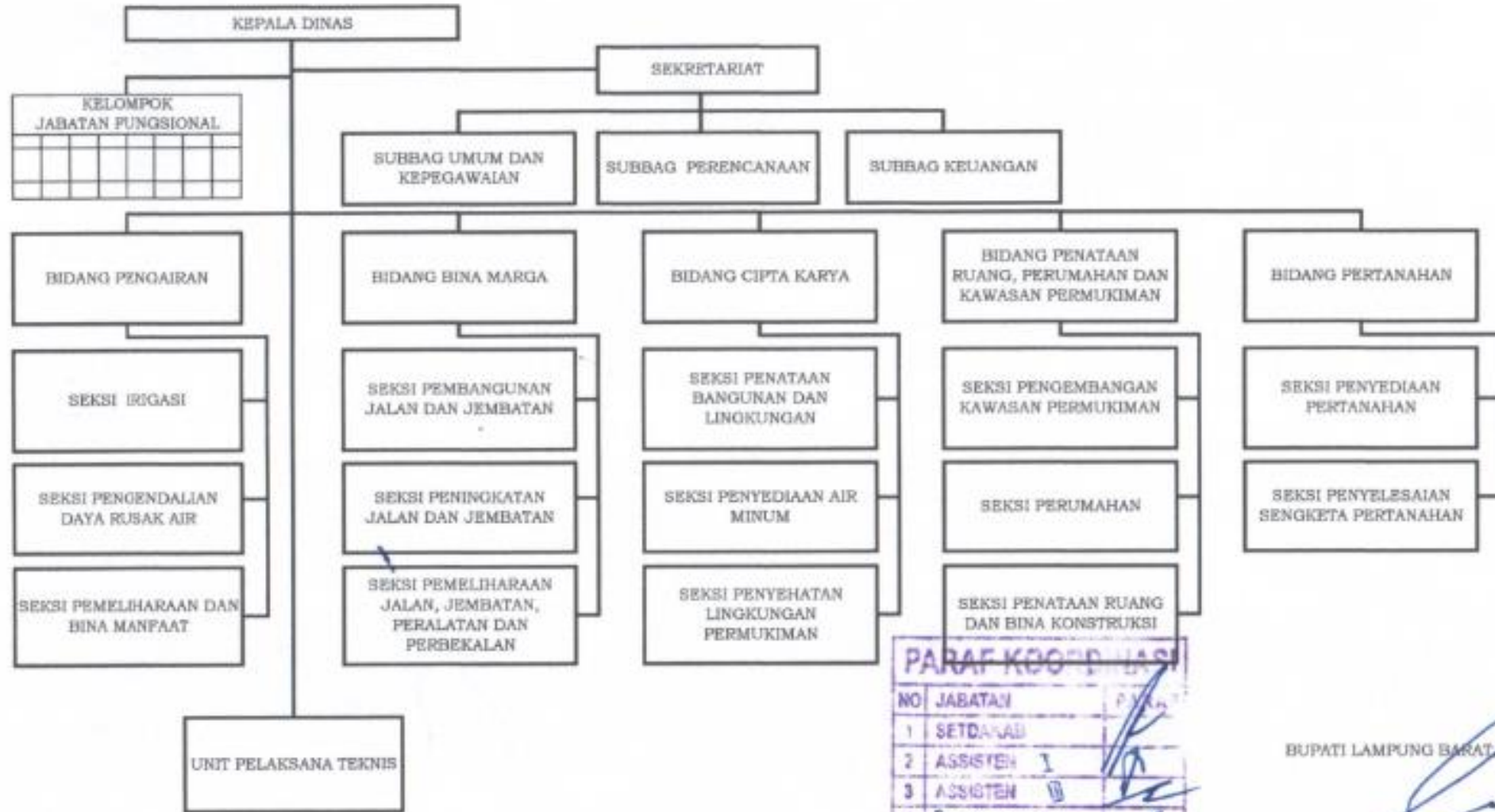
Pembina Utama Muda
NIP.19640912 199703 1 005

LAMPIRAN

- 1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
- 2. Data Pendukung LPPD Tahun 2023**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 72 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Des 2019



PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDA KAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	D. Organisasi
5	O. DUY PR

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No. 5 Telp. (0728) 21401

LIWA 34812

Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Data	Satuan	Keterangan
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	638,44	Ha	
2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1.396,46	Ha	
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	12.436,00	m	
4	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	23.346,00	m	
5	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	595,50	Ha	
6	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	11.444,00	Ha	
7	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	74.428,00	Rumah Tangga	
8	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	84.030,00	Rumah Tangga	
9	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	83.739,00	Rumah Tangga	
10	Jumlah rumah di Kabupaten A	84.030,00	Rumah Tangga	
11	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	49,00	Izin	
12	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	49,00	izin	
13	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	459,38	km	
14	Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	724,00	km	
15	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis			Tidak Ada Data
16	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	350,00	orang	
17	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	258,00	proyek	
18	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	258,00	proyek	

Liwa, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No. 5 Telp. (0728) 21401

LIWA 34812

Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023
Urusan Perumahan dan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Data	Satuan	Keterangan
1	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	-		
2	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	3,00	unit	
3	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni			Tidak Ada Data
4	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan;	-		
5	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	51,26	Ha	
6	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	37,89	Ha	
7	Jumlah unit rumah tidak layak huni	5.201,00	unit	
8	Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	89.704,00	unit	
9	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	-		Tidak Ada Data
10	Jumlah unit rumah kab/kota	89.704,00	unit	

Liwa, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Ir. Ansari

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No. 5 Telp. (0728) 21401

LIWA 34812

Data Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023
Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Data	Satuan	Keterangan
1	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	104.794,03	m2	
2	Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	919.454,03	m2	
3	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	4,00	Bidang	
4	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	4,00	Bidang	
5	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	104.794,03	m2	
6	Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	919.454,03	m2	
7	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	29,00	orang	
8	Jumlah penerima tanah obyek landreform	300,00	orang	
9	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	193.974,00	m2	
10	Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	193.974,00	m2	
11	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	6,00	kasus	
12	Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	6,00	kasus	

Liwa, 10 Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Ir. Ansari

Pembina Utama Muda

NIP. 19640912 199703 1 005